



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEPALA SKK MIGAS,  
DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Hari, tanggal	: Senin, 1 Februari 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 21.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak. MM, CA (Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 46 Orang Anggota Komisi VII DPR RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Acara	: 1. Permasalahan KKKS beserta solusinya 2. Wilayah Kerja PT Pertamina 3. Cost Recovery 4. Dan lain-lain.

**KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak. MM, CA, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Komisi VII DPR RI dengan acara, Permasalahan KKKS beserta solusinya, Wilayah Kerja PT Pertamina, Cost Recovery dan lain-lain.

**II. KESIMPULAN**

1. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan data *cost recovery* secara terperinci dari masing-masing Wilayah Kerja KKKS periode 3 (tiga) tahun terakhir termasuk data *surfactant* untuk *Enhanced Oil Recovery* PT Chevron Pacific Indonesia dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI tanggal 15 Februari 2016.

2. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis hubungan antara *lifting* migas dengan *cost recovery* pada setiap blok disertai data pendukungnya mengingat keduanya tidak berkorelasi secara linier dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI tanggal 15 Februari 2016.
3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk melakukan terobosan kebijakan mengenai berbagai persoalan hulu migas terutama hal-hal yang berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkan akibat rendahnya harga minyak dunia termasuk persoalan izin yang berbelit-belit, aturan perpajakan, persoalan perpanjangan PSC, kontrak kerja dengan pihak ketiga dan *cost recovery*. Disampaikan dalam laporan tertulis pada Komisi VII DPR RI.
4. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI dan Menteri Keuangan RI untuk memberikan dukungan (a.l. harmonisasi kebijakan) kepada industri migas agar mampu bertahan di masa krisis dan juga pengembangan energi baru terbarukan serta hal-hal lain yang dianggap strategis.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas dalam melaksanakan tupoksinya untuk bersikap tegas terhadap KKKS.
6. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan RDP dengan Dirjen Migas, Kepala SKK Migas dan 7 (tujuh) KKKS terbesar serta melakukan kunjungan spesifik dalam rangka melihat sistem monitoring terhadap loading minyak.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 21.00 WIB

DIRJEN MIGAS  
KEMENTERIAN ESDM RI



Prof. Dr. Ir. I GUSTI NYOMAN WIRATMAJA PUJA

Jakarta, 1 Februari 2016

KETUA RAPAT,



H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak. MM, CA

WAKIL KEPALA SKK MIGAS



M.I. ZIKRULLAH